

Analisis Kepentingan Nasional Turki Dalam Rekonstruksi Keamanan Suriah Pasca Runtuhnya Rezim Bashar Al-Assad

Ganjar Widhiyoga^{1*}, Fiona Vondra Ardan Hamingtri²
Universitas Slamet Riyadi^{1,2}

*Email: ganjar.widhiyoga@gmail.com

ABSTRAK

Runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 mengubah lanskap keamanan Suriah dan membuka ruang baru bagi keterlibatan aktor regional, terutama Turki. Artikel ini menganalisis kepentingan nasional Turki dalam rekonstruksi keamanan Suriah pasca-Assad. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini memanfaatkan studi pustaka terhadap literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan media yang telah digunakan dalam penelitian awal. Kerangka analisis dibangun melalui neorealisme ofensif dan geopolitik shatterbelt. Temuan artikel menunjukkan bahwa keterlibatan Turki tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bantuan rekonstruksi pascakonflik. Keterlibatan tersebut merupakan strategi keamanan yang diarahkan untuk mengendalikan dampak kekosongan kekuasaan di Suriah, menekan ancaman kelompok bersenjata Kurdi, mempertahankan zona penyangga di perbatasan, memengaruhi susunan keamanan baru Suriah, serta membuka kembali jalur ekonomi kawasan. Dalam perspektif neorealisme ofensif, Turki memaksimalkan pengaruhnya sebelum aktor lain mengisi ruang strategis yang ditinggalkan rezim Assad. Dalam perspektif geopolitik, Suriah pasca-Assad memperlihatkan ciri shatterbelt karena menjadi ruang rapuh tempat kepentingan lokal, regional, dan eksternal bertemu. Artikel ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi keamanan Suriah bagi Turki adalah bagian dari strategi pertahanan jauh ke depan yang menggabungkan kepentingan keamanan nasional, pengaruh regional, dan stabilisasi kawasan.

Kata Kunci: Turki, Suriah, kepentingan nasional, rekonstruksi keamanan, geopolitik

ABSTRACT

The collapse of Bashar al-Assad's regime in December 2024 transformed Syria's security landscape and opened a new space for regional involvement, particularly by Turkey. This article analyzes Turkey's national interests in Syria's post-Assad security reconstruction. Using a qualitative-descriptive approach, it draws on academic literature, official documents, and media reports already employed in the original research. The analysis is guided by offensive neorealism and the geopolitical concept of shatterbelt. The article argues that Turkey's involvement should not be read merely as post-conflict assistance. It is a security strategy designed to manage the consequences of state weakness in Syria, contain armed Kurdish groups, preserve a border buffer zone, shape Syria's emerging security order, and reopen regional economic corridors. From the perspective of offensive neorealism, Turkey seeks to maximize its influence before other actors occupy the strategic space left by the Assad regime. From a geopolitical perspective, post-Assad Syria

displays shatterbelt characteristics because it remains a fragile arena where local, regional, and external interests intersect. The article concludes that Syria's security reconstruction serves Turkey as a form of forward defense that combines national security interests, regional influence, and broader stabilization objectives.

Keyword: Turkey, Syria, national interest, security reconstruction, geopolitics

PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 menandai salah satu perubahan paling penting dalam politik Timur Tengah pasca-Arab Spring. Setelah lebih dari satu dekade perang sipil, oposisi bersenjata yang dipimpin Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) berhasil memasuki Damaskus dan mengakhiri kekuasaan Assad yang telah berlangsung selama dua puluh empat tahun (El-Khaldi & al-Aswad, 2024). Peristiwa ini tidak hanya mengubah peta politik domestik Suriah, tetapi juga mengguncang keseimbangan kekuatan kawasan. Suriah selama perang telah menjadi ruang kompetisi antara rezim Assad, kelompok oposisi, milisi Kurdi, Rusia, Iran, Turki, Amerika Serikat, dan Israel. Karena itu, perubahan rezim tidak serta-merta menghasilkan stabilitas. Yang muncul justru ruang keamanan baru yang rapuh, diperebutkan, dan belum memiliki otoritas pusat yang benar-benar efektif.

Bagi Turki, Suriah tidak pernah menjadi isu luar negeri yang jauh. Kedua negara berbagi perbatasan panjang, keterhubungan sosial, dan sejarah keamanan yang kompleks. Sejak perang sipil Suriah dimulai pada 2011, Turki menempatkan konflik tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Ancaman itu terutama berkaitan dengan mobilitas kelompok bersenjata di wilayah utara Suriah, keberadaan YPG dan SDF yang dipandang memiliki hubungan dengan PKK, tekanan pengungsi Suriah di dalam negeri, serta kemungkinan terbentuknya otoritas politik Kurdi di sepanjang perbatasan selatan Turki (Kösebalaban, 2020; Luerdi, 2021). Dengan latar ini, kebijakan Turki tidak dapat dipahami hanya sebagai respons kemanusiaan atau solidaritas politik terhadap oposisi Suriah. Kebijakan tersebut sejak awal mengandung kalkulasi keamanan yang kuat.

Pada masa konflik, Turki mendukung sebagian kekuatan anti-Assad. Pasukan Turki menjalankan operasi militer lintas batas dan mendorong pembentukan zona penyangga di Suriah utara. Zona penyangga itu dimaksudkan untuk memutus ruang gerak kelompok bersenjata, mencegah limpahan konflik, serta menyediakan ruang bagi pengelolaan

pengungsi Suriah (Koseoglu, 2019; Stein, 2014). Namun, setelah Assad runtuh, logika keterlibatan Turki mengalami perluasan. Turki tidak hanya berusaha menahan ancaman dari wilayah perbatasan, tetapi juga berupaya ikut membentuk arsitektur keamanan Suriah baru. Keterlibatan Turki dalam pelatihan militer, pengadaan sistem persenjataan dan pembukaan kembali jalur ekonomi menunjukkan bahwa rekonstruksi keamanan Suriah menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan nasional Turki dalam jangka lebih panjang (Daily Sabah, 2025b, 2025c, 2025d; Gumrukcu, 2025; Reuters, 2025).

Artikel ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana kepentingan nasional Turki dapat dipahami melalui keterlibatannya dalam rekonstruksi keamanan Suriah pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad? Pertanyaan ini penting karena studi mengenai Turki dan Suriah selama ini cenderung menekankan fase perang, perubahan kebijakan luar negeri Turki sejak 2011, atau peran negara lain seperti Rusia dalam mempertahankan rezim Assad. Wei (2019) menjelaskan transformasi kebijakan luar negeri Turki terhadap krisis Suriah dengan menekankan perubahan dari diplomasi menuju intervensi militer dan kompetisi pengaruh regional. Sementara itu, Poetra et al. (2023) membahas keterlibatan Rusia di Suriah sebagai bentuk peran nasional untuk mempertahankan rezim Assad. Artikel ini melanjutkan diskusi tersebut, tetapi menggeser fokusnya pada fase pasca-Assad, yaitu ketika Turki menghadapi peluang dan risiko baru dalam rekonstruksi keamanan Suriah.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa rekonstruksi keamanan Suriah bagi Turki merupakan strategi pertahanan jauh ke depan. Turki memanfaatkan perubahan rezim di Suriah untuk mengurangi ancaman di wilayah perbatasannya, menekan kelompok Kurdi bersenjata dan mempertahankan pengaruh atas wilayah strategis Suriah utara. Turki berusaha agar susunan keamanan baru Suriah tidak dikuasai oleh aktor yang merugikan kepentingan Turki. Dalam kerangka neorealisme ofensif, tindakan Turki mencerminkan perilaku negara yang berusaha memaksimalkan pengaruh di lingkungan regional yang tidak pasti. Dalam kerangka geopolitik, Suriah pasca-Assad dapat dipahami sebagai *shatterbelt*, yaitu ruang strategis yang rapuh, terfragmentasi, dan rentan menjadi arena kompetisi aktor lokal maupun eksternal (Cohen, 2015).

TINJAUAN PUSTAKA

Neorealisme Ofensif dan Kepentingan Nasional

Dalam tradisi realisme, kepentingan nasional merupakan konsep sentral untuk memahami perilaku negara. Morgenthau dan Thompson (1978) melihat politik internasional sebagai perjuangan untuk mempertahankan kepentingan yang didefinisikan dalam istilah kekuasaan. Negara bertindak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup, keamanan, dan kapasitasnya untuk memengaruhi lingkungan eksternal. Walaupun pendekatan ini banyak dikritik karena terlalu menekankan sifat manusia dan hasrat berkuasa, realisme tetap berguna untuk membaca tindakan negara dalam situasi konflik, terutama ketika institusi internasional tidak mampu menjamin keamanan secara efektif.

Neorealisme menggeser perhatian dari sifat manusia menuju struktur sistem internasional. Waltz (2001) berpendapat bahwa sistem internasional bersifat anarkis karena tidak ada otoritas tertinggi di atas negara. Dalam kondisi seperti itu, negara harus mengandalkan kemampuan sendiri untuk bertahan. Survival menjadi tujuan utama, sedangkan kekuasaan menjadi sarana untuk menjamin keamanan. Perbedaan kemampuan antarnegara kemudian membentuk pola persaingan dan keseimbangan kekuasaan. Dalam kasus Suriah, anarki tidak hanya muncul pada tingkat sistem internasional, tetapi juga pada tingkat regional ketika otoritas negara Suriah melemah dan aktor-aktor bersenjata bersaing menguasai ruang strategis.

Neorealisme ofensif, terutama sebagaimana dikembangkan Mearsheimer (2001), memberikan penekanan lebih kuat pada kecenderungan negara untuk memaksimalkan kekuasaan. Negara tidak pernah sepenuhnya yakin terhadap niat aktor lain. Karena itu, negara akan berusaha memperluas pengaruh dan mencegah muncul dan membesarnya ancaman. Logika ini membantu menjelaskan mengapa menunggu proses politik pasca-revolusi di Suriah berjalan tidak cukup bagi Turki. Dalam situasi transisi di Suriah yang rapuh, sikap menahan diri Turki dapat berarti memberi ruang kepada aktor lain, termasuk milisi Kurdi, Iran, Israel, Rusia, atau kekuatan lokal yang tidak sejalan dengan kepentingan Turki.

Dalam artikel ini, kepentingan nasional Turki dipahami melalui tiga dimensi. Dimensi pertama adalah keamanan teritorial, terutama perlindungan perbatasan selatan dari infiltrasi kelompok bersenjata dan dampak limpahan konflik. Dimensi kedua adalah stabilitas domestik, yang berkaitan dengan pengelolaan pengungsi Suriah dan sentimen politik dalam negeri Turki. Dimensi ketiga adalah pengaruh regional, yaitu kemampuan Turki untuk memengaruhi arah transisi keamanan Suriah dan mempertahankan posisi Turki sebagai aktor utama dalam politik Timur Tengah. Ketiga dimensi ini saling terkait. Keamanan perbatasan tidak dapat dipisahkan dari persoalan Kurdi, persoalan Kurdi berhubungan dengan politik domestik, dan politik domestik memengaruhi legitimasi kebijakan luar negeri Turki.

Geopolitik *Shatterbelt* dan Posisi Suriah

Geopolitik menempatkan ruang geografis sebagai unsur penting dalam analisis politik luar negeri dan keamanan. Dalam pemikiran klasik, geografi tidak hanya dipahami sebagai lokasi fisik, tetapi juga sebagai sumber kerentanan dan peluang strategis. Mackinder (1904) menekankan pentingnya Eurasia sebagai pusat kekuatan daratan. Sementara, Kaplan (2009) mengingatkan bahwa geografi tetap membatasi pilihan politik negara meskipun teknologi dan norma internasional berkembang. Turki berada pada simpul geopolitik yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, Kaukasus, dan Mediterania. Karena itu, perubahan keamanan di Suriah dengan cepat berubah menjadi persoalan strategis bagi Turki.

Konsep *shatterbelt* dari Cohen (2015) relevan untuk memahami Suriah pasca-Assad. *Shatterbelt* merujuk pada wilayah yang secara geografis strategis, tetapi secara politik rapuh dan menjadi arena persaingan kekuatan eksternal. Ciri-cirinya mencakup fragmentasi otoritas, konflik identitas, keterlibatan aktor luar, dan absennya kekuatan domestik yang mampu membangun tatanan stabil. Suriah pasca 2011 menunjukkan hampir seluruh karakteristik tersebut. Negara ini terpecah dalam wilayah kontrol yang berbeda, dipengaruhi oleh jaringan milisi lokal, dan menjadi ruang intervensi negara regional maupun kekuatan besar.

Setelah Assad runtuh, karakter *shatterbelt* Suriah tidak hilang. Kekalahan rezim justru membuka babak baru dalam kompetisi atas keamanan, institusi dan fasilitas militer, jalur logistik dan hubungan ekonomi kawasan. HTS menguasai wilayah penting yang menjadi

jantung Suriah. SDF mempertahankan pengaruh di timur laut. Sisa jaringan pro-Assad dan aktor eksternal masih memiliki kaki tangan di Suriah, terbukti dengan keberhasilan Israel melakukan serangan terhadap sejumlah target militer di Suriah (BBC, 2024b; Tempo, 2024). Dalam keadaan seperti itu, Suriah menjadi ruang yang penting sekaligus berbahaya bagi Turki. Bila tidak ikut terlibat dalam proses rekonstruksi keamanan di Suriah sesuai kepentingannya, Turki berisiko menghadapi susunan kekuasaan baru yang tidak dapat dikendalikan.

Dari sudut pandang geopolitik, wilayah utara Suriah memiliki nilai yang sangat tinggi bagi Turki. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah bagian selatan Turki dan menjadi pintu bagi jalur perdagangan menuju Yordania dan negara Teluk. Wilayah ini juga menjadi lokasi konsentrasi pengungsi dan kelompok bersenjata. Karena itu, rekonstruksi keamanan Suriah bukan sekadar urusan membangun kembali institusi militer Suriah. Bagi Turki, rekonstruksi itu menyangkut penataan ulang ruang strategis yang memengaruhi keamanan perbatasan, ekonomi lintas kawasan, dan daya tawar diplomatik Turki.

Studi Terdahulu tentang Turki dan Konflik Suriah

Studi mengenai kebijakan Turki terhadap Suriah telah menunjukkan bahwa Turki mengalami perubahan kebijakan yang signifikan sejak 2011. Wei (2019) menjelaskan bahwa Turki pada awalnya mendorong perubahan politik melalui diplomasi, tetapi kemudian bergerak menuju dukungan terhadap oposisi dan operasi militer. Transformasi ini berkaitan dengan gagasan kedalaman strategis, ambisi pengaruh regional, dan ancaman keamanan dari kelompok Kurdi. Kösebalaban (2020) memperkuat pembacaan tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan Turki terhadap Suriah mengalami proses sekuritisasi. Isu Suriah tidak lagi diperlakukan sebagai persoalan diplomasi biasa, tetapi sebagai ancaman yang membenarkan langkah luar biasa, termasuk intervensi militer.

Penelitian Luerdi (2021) membahas intervensi Turki pada tahap awal krisis Suriah dan menunjukkan bahwa ancaman di wilayah perbatasan menjadi alasan utama bagi keterlibatan Turki. Sementara itu, Sugandhi (2025) dan Amin et al. (2024) menyoroti pergeseran kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah, dari penerimaan relatif terbuka menuju orientasi repatriasi dan pengendalian domestik. Kajian-kajian ini penting karena menunjukkan bahwa

kebijakan Turki terhadap Suriah dibentuk oleh pertemuan antara ancaman eksternal dan tekanan dalam negeri.

Di sisi lain, Poetra et al. (2023) menganalisis peran Rusia di Suriah dalam mempertahankan rezim Assad. Kajian tersebut berguna sebagai pembanding karena memperlihatkan bahwa Suriah menjadi arena bagi negara luar untuk menjalankan kepentingan nasional masing-masing. Rusia bertindak sebagai pendukung rezim, sedangkan Turki menjadi pendukung sebagian oposisi dan aktor keamanan perbatasan. Setelah Assad runtuh, perbedaan ini menjadi semakin penting. Rusia kehilangan sebagian ruang pengaruhnya, sementara Turki memperoleh peluang lebih besar untuk membentuk agenda keamanan baru di Suriah.

Penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan tentang intervensi Turki pada fase pasca-Assad. Studi terdahulu banyak membahas intervensi Turki selama perang, relasi Turki dengan oposisi Suriah, atau ancaman Kurdi di Suriah utara. Namun, perubahan rezim membuat pertanyaan penelitian bergeser. Persoalannya bukan lagi hanya mengapa Turki terlibat dalam perang Suriah, tetapi bagaimana Turki memaknai rekonstruksi keamanan Suriah pasca-Assad sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, artikel ini melihat rekonstruksi bukan sebagai tahap teknokratis pascakonflik, melainkan sebagai arena politik keamanan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif, melainkan menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Turki terbentuk dan dijalankan dalam konteks perubahan keamanan Suriah pasca-Assad. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti membaca kebijakan luar negeri sebagai proses yang terkait dengan konteks sejarah, persepsi ancaman, posisi geografis, dan dinamika aktor (Kothari, 2004; Leedy & Ormrod, 2016).

Data yang digunakan berasal dari studi pustaka. Sumber utama mencakup literatur akademik mengenai neorealisme, geopolitik, kebijakan luar negeri Turki, dan konflik Suriah. Sumber pendukung mencakup dokumen resmi seperti pernyataan Kementerian Luar Negeri

Turki mengenai Astana Process, serta laporan media internasional yang relevan mengenai perubahan rezim Suriah, posisi Turki, dan kerja sama keamanan Turki-Suriah. Karena sebagian perkembangan pasca-Assad masih berlangsung, laporan media digunakan secara hati-hati dan ditempatkan sebagai data peristiwa, bukan sebagai dasar teoritis utama.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan perubahan rezim Suriah, kepentingan keamanan Turki, isu Kurdi, pengungsi, dan kerja sama rekonstruksi. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun kronologi dan mengelompokkan kepentingan Turki ke dalam dimensi keamanan perbatasan, pengaruh regional, stabilitas domestik, dan ekonomi strategis. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan neorealisme ofensif dan geopolitik shatterbelt. Prosedur ini mengikuti logika analisis kualitatif yang menekankan reduksi, penyajian, dan verifikasi data (Miles et al., 2020).

PEMBAHASAN

Dari Perang Sipil ke Runtuhnya Rezim Assad

Perang Suriah bermula dari gelombang protes 2011 yang dipicu represi terhadap demonstrasi dan kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata antara rezim dan oposisi. Free Syrian Army, HTS, SDF, Hizbullah, Rusia, Iran, Amerika Serikat, dan Turki masuk dalam konfigurasi konflik yang terus berubah (Al Jazeera, 2023a, 2023b; Evans & Al-Khalidi, 2013). Konflik ini menghasilkan krisis kemanusiaan besar. Pada 2016, utusan PBB memperkirakan sekitar 400.000 orang tewas (Al Jazeera, 2016), sedangkan laporan lain menunjukkan ratusan ribu warga sipil menjadi korban sepanjang perang (Al Jazeera, 2023a).

Intervensi Rusia pada September 2015 menjadi titik balik penting karena membantu rezim Assad merebut kembali sejumlah wilayah strategis, termasuk Aleppo pada 2016 (Petkova, 2020). Dukungan Rusia, Iran, dan Hizbullah membuat Assad mampu bertahan lebih lama dari perkiraan banyak pengamat. Namun, perang Ukraina sejak 2022 dan eskalasi konflik Israel-Palestina sejak 2023 mengubah perhatian para pendukung eksternal Assad. Rusia harus mengalokasikan perhatiannya ke Ukraina, sementara Hizbullah semakin terseret dalam dinamika konflik dengan Israel (Al Jazeera, 2022; Middle East Eye, 2023;

Prensa Latina, 2024). Dalam konteks inilah oposisi Suriah menemukan ruang untuk bergerak kembali.

Pada akhir 2024, pasukan oposisi yang berpusat di Idlib bergerak cepat merebut Aleppo, Hama, Homs, dan akhirnya Damaskus (BBC, 2024a, 2024b). Assad kemudian meninggalkan Suriah menuju Rusia, yang memberikan suaka politik kepada dirinya dan keluarganya (Al Jazeera, 2024; Ibrahim & Kent, 2024). Kejatuhan Assad tidak berarti Suriah segera memasuki masa stabil. Struktur keamanan rezim Assad yang runtuh tidak serta-merta digantikan oleh tata keamanan baru yang solid. Di beberapa wilayah, kontrol teritorial terbagi antara HTS, SDF, kelompok lokal, sisa jaringan pro-rezim, dan aktor eksternal (BBC, 2024b).

Bagi Turki, perubahan ini menciptakan peluang dan sekaligus risiko. Peluangnya terletak pada melemahnya rezim yang selama bertahun-tahun menjadi lawan politik Turki. Risiko utamanya muncul dari kekosongan otoritas, potensi ekspansi SDF atau YPG, mobilitas kelompok bersenjata, serta kemungkinan intervensi aktor lain di wilayah yang berbatasan langsung dengan Turki. Karena itu, respons Turki tidak berhenti pada pernyataan diplomatik. Turki segera menempatkan dirinya sebagai aktor penting dalam transisi Suriah melalui diplomasi, kerja sama keamanan, dan dukungan terhadap rekonstruksi institusional (Daily Sabah, 2024; Soyulu, 2024).

Tabel 1. Pergeseran orientasi kepentingan Turki terhadap Suriah

Fase	Konteks utama	Orientasi kepentingan Turki	Instrumen utama
2011-2015	Perang sipil terjadi dan meluas. Kekuatan oposisi mulai terkonsolidasi. Wilayah perbatasan Turki terdampak langsung.	Mendorong perubahan rezim, mengelola pengungsi, dan mencegah limpahan konflik.	Dukungan diplomatik kepada oposisi, bantuan kemanusiaan, dan tekanan politik terhadap Assad.
2016-2020	Rusia memperkuat Assad. SDF/YPG menguasai sejumlah wilayah di utara. Idlib menjadi pusat oposisi.	Mencegah terbentuknya entitas Kurdi otonom dan mempertahankan zona penyangga.	Operasi militer lintas batas, safe zone, Astana Process, dan koordinasi terbatas dengan Rusia.
2021-2024	Intensitas konflik antara Assad dan oposisi menurun tetapi belum selesai.	Menjaga posisi di Suriah utara dan mengelola tekanan domestik yang mulai	Keberlanjutan kehadiran militer, diplomasi regional, dan kebijakan repatriasi bertahap.

	Kekuatan militer Rusia teralihkan ke Ukraina. Konflik Israel-Palestina meningkat.	mempermasalahkan pengungsi.	
Pasca Desember 2024	Rezim Assad runtuh. Otoritas Suriah terfragmentasi, sementara arsitektur keamanan baru belum terbentuk.	Melakukan rekonstruksi keamanan Suriah agar sesuai dengan kepentingan keamanan Turki.	Pelatihan militer, dukungan peralatan, diplomasi rekonstruksi, pengaruh atas wilayah strategis, dan pembukaan jalur ekonomi.

Sumber: Diolah dari Wei (2019), Kösebalaban (2020), BBC (2024b), Daily Sabah (2025b, 2025c, 2025d), dan Gumrukcu (2025).

Suriah Pasca-Assad sebagai *Shatterbelt*

Suriah pasca-Assad memperlihatkan ciri *shatterbelt* dalam arti yang kuat. Pertama, otoritas negara terfragmentasi. Rezim yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan runtuh, tetapi tidak segera digantikan oleh pemerintahan baru yang memiliki kapasitas penuh untuk mengendalikan seluruh wilayah. Kedua, aktor lokal bersaing dalam ruang yang belum stabil. HTS, SDF, kelompok oposisi lain, dan jaringan pro-rezim memiliki kepentingan berbeda. Ketiga, aktor eksternal tetap hadir. Turki, Israel, Iran, Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Keempat, identitas politik, sektarian, dan etnis masih menjadi sumber kerentanan.

Konsep *shatterbelt* membantu menjelaskan mengapa Suriah menjadi persoalan langsung bagi Turki. Dalam wilayah yang rapuh dan terfragmentasi, ancaman tidak selalu muncul dalam bentuk serangan negara terhadap negara. Ancaman dapat muncul dari milisi, jaringan teror, arus pengungsi atau terbentuknya otoritas lokal yang dianggap mengganggu integritas teritorial Turki. Dalam konteks ini, batas negara tidak sepenuhnya berfungsi sebagai pemisah keamanan. Perubahan kecil di Suriah utara dapat berdampak pada politik domestik Turki, terutama terkait isu Kurdi dan pengungsi.

Suriah utara juga memiliki nilai strategis karena berada di antara beberapa ruang geopolitik penting. Wilayah ini menghubungkan Turki dengan Levant, Irak, Yordania, dan jalur menuju Teluk. Suriah utara juga dekat dengan pangkalan dan koridor logistik yang pernah menjadi basis kelompok bersenjata. Karena itu, bagi Turki, rekonstruksi keamanan Suriah bukan sekadar persoalan menstabilkan negara tetangga. Upaya rekonstruksi

keamanan ini merupakan upaya Turki untuk mengatur kembali ruang strategis yang selama lebih dari satu dekade menjadi sumber ancaman lintas batas.

Dalam situasi seperti itu, keterlibatan Turki memiliki logika pencegahan. Turki berusaha memastikan agar Suriah pasca-Assad tidak berubah menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan oleh PKK/YPG, ISIS, sisa jaringan pro-Iran, atau kekuatan lain yang berpotensi menekan kepentingan Turki (Dincel, 2024; Reuters, 2025). Dengan kata lain, rekonstruksi keamanan dipahami sebagai cara Turki untuk mengendalikan konsekuensi geopolitik dari keruntuhan negara tetangga.

Kepentingan Nasional Turki dalam Rekonstruksi Keamanan Suriah

Kepentingan pertama dan paling mendasar Turki adalah keamanan perbatasan. Turki melihat wilayah utara Suriah sebagai ruang depan pertahanan nasionalnya. Keberadaan YPG dan SDF dipersepsikan sebagai ancaman karena Turki memandang keduanya berkaitan dengan PKK, yang merupakan ancaman bagi kedaulatan Turki. Walaupun pandangan ini tidak selalu diterima oleh negara-negara mitra Turki, persepsi ancaman tersebut menjadi dasar utama operasi lintas batas dan keberlanjutan kehadiran militer Turki di Suriah utara (Kösebalaban, 2020; Luerdi, 2021). Setelah Assad runtuh, risiko yang dikhawatirkan Turki bukan hanya keberadaan kelompok-kelompok tersebut, tetapi juga kemungkinan mereka mengisi kekosongan otoritas di wilayah strategis.

Kepentingan kedua Turki adalah mempertahankan zona penyangga. Zona penyangga antara Suriah dan Turki ini telah lama menjadi gagasan dalam kebijakan Turki terhadap Suriah (Stein, 2014). Zona penyangga ini memiliki multi fungsi bagi kepentingan nasional Turki. Secara militer, zona ini menjaga jarak antara ancaman bersenjata dan wilayah Turki. Secara politik, zona ini memberi Turki ruang pengaruh dalam negosiasi mengenai masa depan Suriah. Secara sosial, zona tersebut berkaitan dengan wacana repatriasi sebagian pengungsi Suriah yang selama ini menjadi isu sensitif dalam politik domestik Turki (Amin et al., 2024; Sugandhi, 2025).

Kepentingan ketiga Turki adalah menguatkan pengaruhnya di kawasan. Runtuhnya Assad mengubah distribusi pengaruh di Suriah. Rusia dan Iran tidak lagi memiliki posisi yang sama seperti ketika rezim Assad masih bertahan. Pudarnya pengaruh Rusia dan Iran di

kawasan membuka peluang bagi aktor-aktor lain seperti negara-negara Arab, Israel dan Amerika Serikat untuk masuk dan menancapkan pengaruh mereka di kawasan. Dalam konteks neorealisme ofensif, Turki memiliki insentif untuk memperbesar pengaruhnya sebelum ruang itu diambil aktor lain. Hal ini tidak selalu berarti ambisi aneksasi wilayah. Dalam upayanya untuk memperkuat pengaruh di kawasan, Turki berusaha menjadi aktor yang menentukan dalam pembentukan struktur keamanan baru Suriah. Posisi ini akan meningkatkan daya tawar Turki dalam isu Kurdi, pengungsi, perdagangan kawasan, dan hubungan dengan Barat.

Kepentingan keempat Turki berkaitan dengan ekonomi strategis. Rekonstruksi keamanan membuka peluang pemulihan jalur perdagangan melalui Suriah menuju Yordania dan negara-negara Teluk. Laporan mengenai kunjungan pelaku usaha Turki ke Damaskus, forum bisnis Turki-Suriah, dan peningkatan ekspor menunjukkan bahwa keamanan dan ekonomi saling terkait dalam kebijakan Turki (Bagis & Ergocun, 2025; Levant 24, 2025; Mustaqim, 2025). Stabilitas Suriah akan mengurangi biaya keamanan Turki sekaligus membuka pasar dan jalur logistik baru. Karena itu, keterlibatan Turki dalam rekonstruksi keamanan Suriah pasca-Assad dapat dibaca sebagai upaya Turki menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

Di titik ini terlihat bahwa kepentingan nasional Turki tidak tunggal. Turki memiliki berbagai kepentingan nasional yang terkait dengan Suriah, mencakup pertahanan wilayah, stabilitas politik domestik, pengaruh regional, dan peluang ekonomi. Seluruh kepentingan nasional Turki tersebut bertemu pada satu asumsi dasar: Suriah yang tidak stabil akan merugikan Turki. Di saat yang sama, Suriah yang stabil tetapi dikuasai aktor yang memusuhi Turki juga berbahaya bagi kepentingan nasional Turki. Oleh karena itu, Turki mendorong terbentuknya stabilitas di Suriah yang berada dalam jangkauan pengaruh Turki.

Instrumen Rekonstruksi Keamanan Turki

Setelah Assad runtuh, Turki menggunakan beberapa instrumen untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dengan merekonstruksi stabilitas di Suriah. Instrumen pertama adalah keberlanjutan kehadiran militer. Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler menyatakan bahwa Turki tidak memiliki rencana segera untuk menarik pasukannya dari Suriah karena

keamanan perbatasan masih membutuhkan pengawasan langsung (Gumrukcu, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Turki melihat transisi Suriah belum cukup aman untuk dibiarkan berjalan tanpa kehadiran Turki. Dalam logika neorealisme ofensif, kehadiran militer Turki berfungsi sebagai jaminan keamanan sekaligus alat menguatkan pengaruh Turki di Suriah.

Instrumen kedua adalah kerja sama militer formal dengan otoritas transisi Suriah. Pada 2025, Turki dilaporkan mulai membantu Suriah melalui pelatihan personel militer, dukungan teknis, sistem persenjataan, dan peralatan tertentu (Daily Sabah, 2025b, 2025c; Reuters, 2025). Bentuk dukungan ini penting karena rekonstruksi keamanan tidak hanya menyangkut operasi militer, tetapi juga pembangunan ulang institusi pertahanan. Dengan melatih dan mendampingi unsur militer Suriah, Turki dapat memengaruhi orientasi keamanan Suriah baru. Ini memberikan Turki posisi yang lebih kuat dibandingkan aktor yang hanya memberi dukungan diplomatik atau ekonomi.

Instrumen ketiga adalah diplomasi rekonstruksi. Turki mendorong komunitas internasional untuk memperbesar dukungan terhadap pemulihan Suriah, termasuk pengurangan sanksi dan bantuan terhadap proses transisi (Aydogan, 2025; Daily Sabah, 2025a). Diplomasi rekonstruksi ini memiliki dua fungsi. Di satu sisi, upaya diplomasi ini memperlihatkan Turki sebagai aktor stabilisasi kawasan. Di sisi lain, upaya ini membantu menciptakan lingkungan internasional yang lebih kondusif bagi peran Turki di Suriah. Dengan demikian, upaya diplomasi rekonstruksi ini menjadi arena untuk membangun legitimasi bagi keterlibatan Turki di Suriah.

Instrumen keempat adalah penguasaan atau pengaruh atas titik strategis. Laporan mengenai rencana Turki mengambil peran di pangkalan udara Tiyas T4 di Provinsi Homs menunjukkan bahwa Turki memperhatikan infrastruktur militer yang memiliki nilai operasional tinggi (Middle East Eye, 2025). Walaupun perkembangan seperti ini perlu dibaca secara hati-hati karena sebagian berasal dari laporan media, namun perkembangan ini tetap menunjukkan kecenderungan strategis Turki yakni mengamankan fasilitas yang dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di Suriah. Dalam perspektif neorealisme ofensif,

Turki berupaya untuk menanamkan pengaruh di titik strategis Suriah untuk mencegah aktor lain menggunakannya sebagai sumber tekanan.

Instrumen kelima adalah rekonstruksi sipil yang mendukung keamanan. Turki dan Suriah memperluas kerja sama pada pembersihan puing, pembersihan ranjau, reformasi sistem darurat, dan penanggulangan bencana (Daily Sabah, 2025d). Kegiatan ini tampak teknis, tetapi memiliki makna keamanan. Ranjau, puing perang, dan lemahnya sistem darurat dapat menghambat pemulihan masyarakat, memperlambat repatriasi, dan membuka ruang bagi kelompok bersenjata. Karena itu, rekonstruksi sipil dan rekonstruksi keamanan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya.

Tabel 2. Instrumen Turki dalam rekonstruksi keamanan Suriah pasca-Assad

Instrumen	Bentuk kebijakan	Fungsi bagi kepentingan Turki	Sumber
Kehadiran militer	Mempertahankan pasukan di Suriah utara dan menolak penarikan segera.	Menjaga perbatasan, mencegah perluasan SDF/YPG, dan mempertahankan daya tawar Turki.	Gumrukcu (2025); North Press (2025)
Pelatihan militer	Membuka pelatihan bagi personel Suriah di fasilitas Turki dan akademi militer.	Membentuk kapasitas keamanan Suriah baru yang lebih sejalan dengan kepentingan Turki.	Daily Sabah (2025c); Turkiye Today (2025)
Dukungan sistem dan peralatan	Menyediakan dukungan teknis, logistik, sistem senjata, dan peralatan tertentu.	Memperkuat otoritas keamanan Suriah terhadap kelompok non-negara sekaligus memperluas pengaruh Turki.	Daily Sabah (2025b); Reuters (2025)
Diplomasi rekonstruksi	Mendesak dukungan internasional terhadap pemulihan Suriah dan pelonggaran sanksi.	Membangun legitimasi Turki sebagai aktor stabilisasi dan mengurangi beban rekonstruksi unilateral.	Aydogan (2025); Daily Sabah (2025a)
Pengaruh atas titik strategis	Mengamankan fasilitas militer penting seperti T4 menurut laporan media.	Mencegah aktor lain menguasai aset militer yang berpengaruh terhadap keseimbangan kawasan.	Middle East Eye (2025)
Rekonstruksi sipil-keamanan	Kerja sama pembersihan ranjau, puing, dan reformasi sistem darurat.	Menciptakan kondisi minimal bagi stabilitas sosial, repatriasi, dan pengendalian wilayah.	Daily Sabah (2025d)

Makna Strategis: Rekonstruksi sebagai Pertahanan Jauh ke Depan

Keterlibatan Turki dalam rekonstruksi keamanan Suriah dapat dipahami sebagai pertahanan jauh ke depan. Istilah ini merujuk pada upaya negara mengelola ancaman sebelum ancaman tersebut mencapai wilayah nasional. Dalam kasus Turki, garis pertahanan tidak lagi berhenti di perbatasan formal. Garis itu bergerak ke wilayah Suriah utara, ke institusi keamanan Suriah baru, dan ke jaringan diplomasi regional yang menentukan masa depan Suriah.

Pembacaan ini tidak berarti bahwa seluruh tindakan Turki bersifat ekspansionis dalam arti teritorial. Lebih tepatnya, Turki berusaha membangun lingkungan strategis yang lebih aman melalui menanamkan pengaruh institusional dan militer di Suriah. Turki memiliki kepentingan agar pemerintahan Suriah pasca-Assad tidak memberi ruang kepada kelompok Kurdi bersenjata, tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh Iran atau aktor lain yang berseberangan dengan Turki, dan tidak kembali menjadi sumber pengungsi dalam jumlah besar. Dengan demikian, stabilitas di Suriah yang berusaha dibangun oleh Turki adalah stabilitas yang kompatibel dengan keamanan nasional dan kepentingan nasional Turki.

Dari perspektif neorealisme ofensif, tindakan Turki ini rasional. Dalam lingkungan anarkis dan tidak pasti, negara tidak menunggu ancaman terbentuk sempurna. Negara yang memiliki kapasitas akan bergerak lebih awal untuk memperbaiki posisi relatifnya. Suriah pasca-Assad menyediakan ruang bagi Turki untuk memperkuat posisinya sekaligus mengeliminasi potensi ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Bila Turki tidak bergerak, aktor lain dapat mengisi kekosongan ini dan mungkin menciptakan kondisi yang merugikan kepentingan nasional Turki. Di sisi lain, bila Turki bergerak terlalu jauh, intervensi Turki ini berisiko menimbulkan resistensi lokal dan ketegangan dengan aktor eksternal. Turki harus dapat menciptakan legitimasi bagi keterlibatannya di Suriah. Karena itulah, Turki menggunakan kombinasi kehadiran militer, kerja sama formal, diplomasi rekonstruksi, dan pembukaan ekonomi. Kombinasi ini memungkinkan Turki memperluas pengaruh tanpa harus menanggung seluruh biaya okupasi langsung.

Namun, strategi Turki ini juga mengandung risiko. Pertama, rekonstruksi keamanan yang terlalu dekat dengan kepentingan Turki dapat dipandang oleh sebagian aktor Suriah sebagai dominasi eksternal. Kedua, tekanan terhadap kelompok Kurdi dapat memperpanjang konflik bila tidak disertai pengaturan politik yang inklusif. Ketiga, keterlibatan militer Turki di titik strategis dapat memicu gesekan dengan Israel, Amerika Serikat, Rusia, atau Iran. Keempat, proses rekonstruksi yang bergantung pada Turki dapat membuat Suriah baru rentan terhadap ketergantungan politik dan ekonomi. Dengan kata lain, rekonstruksi keamanan dapat menghasilkan stabilisasi, tetapi juga dapat menciptakan ruang kompetisi baru bagi kepentingan nasional Turki.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional Turki dalam rekonstruksi keamanan Suriah pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad bukan hanya berdasarkan satu motif tunggal. Keterlibatan Turki dibentuk oleh pertemuan antara ancaman perbatasan, isu Kurdi, tekanan pengungsi, peluang pengaruh regional, dan prospek ekonomi pascakonflik. Dalam kerangka geopolitik shatterbelt, Suriah pasca-Assad merupakan ruang rapuh yang mempertemukan konflik lokal, persaingan regional, dan kepentingan kekuatan eksternal. Runtuhnya Assad membuka peluang bagi Turki untuk memperluas pengaruhnya, tetapi juga menghadirkan risiko baru berupa fragmentasi otoritas Suriah dan kompetisi antaraktor yang pada akhirnya dapat menghadirkan ancaman bagi kepentingan nasional Turki.

Dalam kerangka neorealisme ofensif, Turki bertindak sebagai negara yang berusaha memaksimalkan posisi strategisnya di tengah lingkungan regional yang tidak pasti. Turki mempertahankan kehadiran militer, membantu pelatihan dan pembangunan kembali institusi keamanan Suriah, mendukung diplomasi rekonstruksi, dan berupaya mengamankan titik-titik strategis di Suriah. Semua langkah ini bertujuan untuk mencegah terbentuknya tatanan Suriah baru yang merugikan kepentingan nasional Turki. Rekonstruksi keamanan Suriah bagi Turki adalah strategi pertahanan jauh ke depan. Keterlibatan Turki dalam rekonstruksi keamanan Suriah bukan hanya proyek stabilisasi negara tetangga, melainkan cara Turki untuk

mengelola ancaman, membentuk lingkungan strategis, dan mempertahankan pengaruh regional.

Keberhasilan strategi pertahanan jauh ke depan ini akan bergantung pada kemampuan Turki dalam menyeimbangkan tiga hal: kebutuhan keamanan nasionalnya, legitimasi politik Suriah pasca-Assad, dan sensitivitas aktor regional lain. Bila keseimbangan ini gagal, rekonstruksi keamanan di Suriah dapat berubah menjadi arena persaingan baru. Namun bila dikelola secara hati-hati, keterlibatan Turki dapat menjadi salah satu faktor yang membantu menurunkan instabilitas Suriah utara dan membuka jalan bagi pemulihan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. (2016, April 23). *Syria death toll: UN envoy estimates 400,000 killed*. <https://www.aljazeera.com/news/2016/4/23/syria-death-toll-un-envoy-estimates-400000-killed>
- Al Jazeera. (2022, February 24). *Russian forces launch full-scale invasion of Ukraine*. <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/putin-orders-military-operations-in-eastern-ukraine-as-un-meets>
- Al Jazeera. (2023a, March 15). *Twelve years on from the beginning of Syria's war*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/3/15/twelve-years-on-from-the-beginning-of-syrias-war>
- Al Jazeera. (2023b, May 7). *Arab League brings Syria back into its fold after 12 years*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/7/arab-league-agrees-to-bring-syria-back-into-its-fold>
- Al Jazeera. (2024, December 9). *Russia gave asylum to deposed Syrian President al-Assad, Kremlin confirms*. <https://www.aljazeera.com/news/2024/12/9/russia-gave-asylum-to-deposed-syrian-president-al-assad-kremlin-confirms>
- Amin, K., Sarmila, L. J., & Al Farauqi, I. M. D. A. (2024). Dari pintu terbuka ke repatriasi: Pergeseran kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
- Aydogan, M. (2025, May 21). *Türkiye calls on global community to scale up support for Syria's reconstruction*. Anadolu Ajansi. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkiye-calls-on-global-community-to-scale-up-support-for-syrias-reconstruction/3575603>
- Bagis, H., & Ergocun, G. (2025, July 7). *Turkish business world shifts focus to Syria's recovery*. Anadolu Ajansi. <https://www.aa.com.tr/en/economy/turkish-business-world-shifts-focus-to-syria-s-recovery/3624348>

- BBC. (2024a, December 9). *Pemberontak HTS kuasai Damaskus, rumah Assad dijarah warga: Apa yang terjadi di Suriah?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2vv9rp3dlo>
- BBC. (2024b, December 13). *Syria in maps: Who controls the country now Assad has gone?* <https://www.bbc.com/news/articles/c2ex7ek9pyeo>
- Cohen, S. B. (2015). *Geopolitics: The geography of international relations* (3rd edn). Rowman & Littlefield.
- Daily Sabah. (2024, December 9). *Türkiye launches diplomatic blitz for future of Syria after Assad.* <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-launches-diplomatic-blitz-for-future-of-syria-after-assad>
- Daily Sabah. (2025a, May 12). *Türkiye urges stronger global support for Syria's reconstruction.* <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-urges-stronger-global-support-for-syrias-reconstruction>
- Daily Sabah. (2025b, August 14). *Türkiye says will help Syria with weapons systems, equipment.* <https://www.dailysabah.com/politics/turkiye-says-will-help-syria-with-weapons-systems-equipment/news>
- Daily Sabah. (2025c, September 11). *Türkiye begins military training, support for Syrian army.* <https://www.dailysabah.com/politics/turkiye-begins-military-training-support-for-syrian-army/news>
- Daily Sabah. (2025d, December 8). *Türkiye, Syria expand cooperation in emergency reform, reconstruction.* <https://www.dailysabah.com/politics/turkiye-syria-expand-cooperation-in-emergency-reform-reconstruction/news>
- Dincel, S. (2024, December 8). *Türkiye acting carefully to ensure Daesh/ISIS, PKK terrorists do not exploit post-regime Syria: Foreign minister.* Anadolu Ajansi. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkiye-acting-carefully-to-ensure-daesh-isis-pkk-terrorists-do-not-exploit-post-regime-syria-foreign-minister/3418087>
- El-Khaldi, A., & al-Aswad, H. (2024, December 8). *Syrian rebels defeat Assad after 14 years of war.* Middle East Eye. <https://www.middleeasteye.net/news/syrian-rebels-defeat-assad-after-14-years-war>
- Evans, D., & Al-Khalidi, S. (2013, March 18). *From teenage graffiti to a country in ruins: Syria's two years of rebellion.* Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-uprising/from-teenage-graffiti-to-a-country-in-ruins-syrias-two-years-of-rebellion-idUSBRE92G06420130317/>
- Gumrukcu, T. (2025, June 4). *Turkey backing Syria's military and has no immediate withdrawal plans, defence minister says.* Reuters. <https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-backing-syrias-military-has-no-immediate-withdrawal-plans-defence-2025-06-04>

- Ibrahim, N., & Kent, L. (2024, December 16). *Assad says he didn't plan to flee Syria, according to presidency Telegram account*. CNN. <https://edition.cnn.com/2024/12/16/middleeast/syria-bashar-assad-statement-intl>
- Kaplan, R. D. (2009). The revenge of geography. *Foreign Policy*, 172, 96–105.
- Kösebalaban, H. (2020). Transformation of Turkish foreign policy toward Syria: The return of securitization. *Middle East Critique*, 29(3), 335–344. <https://doi.org/10.1080/19436149.2020.1770450>
- Koseoglu, S. (2019, October 8). *Will Turkey succeed in creating a “safe zone” for Syrians?* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/8/will-turkey-succeed-in-creating-a-safe-zone-for-syrians>
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques*. New Age International.
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2016). *Practical research: Planning and design*. Pearson.
- Levant 24. (2025, October 14). *Turkish-Syrian businessmen forum opens new horizons for industrial cooperation*. <https://levant24.com/news/2025/10/turkish-syrian-businessmen-forum-opens-new-horizons-for-industrial-cooperation>
- Luerdi. (2021). Intervensi Turki dalam krisis Suriah (2011-2014). *International Society*, 3. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h4xwt>
- Mackinder, H. J. (1904). The geographical pivot of history. *The Geographical Journal*, 23(4), 421–437.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W. W. Norton.
- Middle East Eye. (2023, October 7). *Palestinian attack on Israel: What we know*. <https://www.middleeasteye.net/news/hamas-attack-israel-what-we-know>
- Middle East Eye. (2025, April 1). *Turkey moves to take control of Syria's strategic T4 air base: Sources*. <https://www.middleeasteye.net/news/turkey-moves-take-control-syrias-strategic-t4-air-base-sources>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th edn). SAGE Publications.
- Morgenthau, H. J., & Thompson, K. W. (1978). *Politics among nations: The struggle for power and peace* (6th edn). Alfred A. Knopf.
- Mustaqim, A. H. (2025, November 10). *Turki buka koridor perdagangan darat bersejarah ke Yordania dan Suriah, integrasi Timur Tengah menguat?* Sindo News. <https://international.sindonews.com/read/1642517/43/turki-buka-koridor-perdagangan-darat-bersejarah-ke-yordania-dan-suriah-integrasi-timur-tengah-menguat-1762758678>
- North Press. (2025, June 4). *Turkey says no immediate plans to withdraw troops from Syria*. <https://npasyria.com/en/126383/>

- Petkova, M. (2020, October 1). *What has Russia gained from five years of fighting in Syria?* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/features/2020/10/1/what-has-russia-gained-from-five-years-of-fighting-in-syria>
- Poetra Phoenia, R., Purnama, C., & Dermawan, W. (2023). Peran nasional Rusia terhadap konflik Suriah (2015-2020). *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1). <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.25262>
- Prensa Latina. (2024, October 7). *Hezbollah reaffirms support for Palestine a year after Al-Aqsa Flood*. <https://www.plenglish.com/news/2024/10/07/hezbollah-reaffirms-support-for-palestine-a-year-after-al-aqsa-flood/>
- Reuters. (2025, August 14). *Turkey to help Syria with weapon systems, equipment under new accord, source says*. <https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-help-syria-with-weapon-systems-equipment-under-new-accord-source-says-2025-08-14/>
- Soylu, R. (2024, December 8). *What's next for Turkey in Syria?* Middle East Eye. <https://www.middleeasteye.net/news/whats-next-turkey-syria>
- Stein, A. (2014, December 11). *The origins of Turkey's buffer zone in Syria*. War on the Rocks. <https://warontherocks.com/2014/12/the-origins-of-turkeys-buffer-zone-in-syria/>
- Sugandhi. (2025). Between borders and policies: Turkey's evolving approach to the Syrian refugee crisis. *Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 16–23. <https://doi.org/10.71233/kared.1669919>
- Tempo. (2024, December 12). *Situasi Suriah setelah kekuasaan Bashar al-Assad roboh*. <https://www.tempo.co/internasional/situasi-suriah-setelah-kekuasaan-bashar-al-assad-roboh-1180517>
- Türkiye Today. (2025, October 30). *Syrian military units begin training at Turkish facilities*. <https://www.turkiyetoday.com/region/syrian-military-units-begin-training-at-turkish-facilities-3209216>
- Waltz, K. N. (2001). *Man, the state and war* (3rd edn). Columbia University Press.
- Wei, M. (2019). Turkish foreign policy towards the Syrian crisis: Dynamics of transformation. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 13(3), 462–477. <https://doi.org/10.1080/25765949.2019.1630573>